

JURNAL

AKUNTANSI & KEUANGAN

Volume 7, No. 2, September 2016

ISSN: 2087-2054

Dewan Pembina

Dr. Ir. M. Yusuf S. Barusman, M.B.A
Dr. Andala Rama Putra Barusman, S.E., M.A.Ec.

Penanggung Jawab

Dra. Rosmiaty Tarmizi, M.M.Akt. C.A

Pimpinan Redaksi

Dr. Angrita Denziana, S.E., M.M, Ak. C.A

Sekretaris Redaksi

Riswan, S.E., M.S.Ak
Haninun, S.E., M.S.Ak

Penyuting Ahli

Tina Miniawati, S.E., M.B.A. (Universitas Trisakti)
Dr. Khomsiyah, S.E., M.M. (Universitas Trisakti)
Dr. Lindrianasari, S.E., M.Si.Akt., C.A. (Universitas Lampung)
Sujoko Efferin, Mcom (Hons), MA(Econ), Ph.D. (Universitas Surabaya)

Penerbit

Universitas Bandar Lampung
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi
SENARAI-Jurnal Akuntansi & Keuangan Terbit 2 kali setahun pada bulan Maret &
September

Artikel yang dimuat berupa hasil riset Empiris dan telaah teoritis konseptual yang kritis
dalam kajian bidang akuntansi, auditing, perpajakan, dan keuangan.

Alamat Redaksi

Gedung G- Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bandar Lampung
Kampus A Jalan Z.A Pagar Alam No. 26 Labuan Ratu Bandar Lampung 35142
Telp: (0721) 701979, Fax: (0721) 701467, Email: *Prodi.akuntansi@ubl.ac.id*

JURNAL

AKUNTANSI & KEUANGAN

Volume 7, No. 2, September 2016

ISSN: 2087-2054

Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Se-Sumatera)

Khairudin & Rina Erlanda

Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Penjualan Dan Perputaran Piutang Terhadap Likuiditas Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014

Indrayenti & Siska Natania

Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Pada Koperasi Simpan Pinjam Di Kabupaten Tulang Bawang Barat

Herry Goenawan Soedarsa & Desty Natalia

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Metode Penilaian Persediaan Pada Perusahaan Dagang Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014

Riswan & Restiani Fasa

Analisis *Du Pont System* Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Kasus Pada Perusahaan Telekomunikasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014)

Rosmiati Tarmizi & Merlinda Marlim

Analisis Simulasi Penerapan Akuntansi Sumber Daya Manusia Terhadap Perbandingan Kinerja Keuangan (Studi Kasus Pada Pt Bank Pembangunan Daerah Lampung Tahun 2012-2014)

Yunus Fiscal & Desma

Analisis Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Tergolong Lq45 Di Bei Periode 2011-2014)

Angrita Denziana & Winda Monica

Pengaruh Brand Image, Dan Lapangan Pekerjaan Terhadap Keputusan Mahasiswa Untuk Memilih Jurusan Akuntansi Pada Perguruan Tinggi Yang Ada Di Bandar Lampung

Chairul Anwar & Fredi Budiman

JURNAL

AKUNTANSI & KEUANGAN

Volume 7, No. 2, September 2016

ISSN: 2087-2054

Daftar Isi

	Halaman
Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Se-Sumatera) Khairudin & Rina Erlanda	137-154
Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Penjualan Dan Perputaran Piutang Terhadap Likuiditas Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014 Indrayenti & Siska Natania	155-167
Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Pada Koperasi Simpan Pinjam Di Kabupaten Tulang Bawang Barat Herry Goenawan Soedarsa & Desty Natalia	169-191
Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Metode Penilaian Persediaan Pada Perusahaan Dagang Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014 Riswan & Restiani Fasa	193-210
Analisis <i>Du Pont System</i> Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Kasus Pada Perusahaan Telekomunikasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014) Rosmiati Tarmizi & Merlinda Marlim	211-223
Analisis Simulasi Penerapan Akuntansi Sumber Daya Manusia Terhadap Perbandingan Kinerja Keuangan (Studi Kasus Pada Pt Bank Pembangunan Daerah Lampung Tahun 2012-2014) Yunus Fiscal & Desma	225-240
Analisis Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Tergolong Lq45 Di Bei Periode 2011-2014) Angrita Denziana & Winda Monica	241-254
Pengaruh Brand Image, Dan Lapangan Pekerjaan Terhadap Keputusan Mahasiswa Untuk Memilih Jurusan Akuntansi Pada Perguruan Tinggi Yang Ada Di Bandar Lampung Chairul Anwar & Fredi Budiman	255-276

JURNAL

AKUNTANSI & KEUANGAN

Volume 7, No. 2, September 2016

ISSN: 2087-2054

Informasi Kebijakan dan Selingkung Berkala

I. Kebijakan editorial

JURNAL Akuntansi & Keuangan adalah sebuah berkala yang dipublikasikan oleh Universitas Bandar Lampung, yang bertujuan untuk menjadi wadah kreatifitas para akademisi, profesional, peneliti, dan mahasiswa di bidang Akuntansi dan Keuangan termasuk juga bidang Auditing, Sistem Informasi Akuntansi, Tata kelola Perusahaan, Perpajakan, Akuntansi Internasional, Akuntansi Managemen, Akuntansi Keperilakuaan, Pasar Modal dan lain sebagainya. Topik yang semakin meluas di bidang kajian riset Akuntansi diakomodir publikasinya di dalam berkala ini.

Paper yang akan dipublikasikan di dalam berkala **JURNAL** Akuntansi & Keuangan harus ditulis di dalam bahasa Indonesia yang baik dan sesuai dengan EYD. Semua instrumen yang digunakan untuk memperoleh data penelitian harus dimasukkan di dalam lampiran paper penelitian, paling tidak, penulis bersedia memberikan klarifikasi atas instrumen yang digunakan saat ada permintaan dari peneliti lainnya.

Sekretariat Editor Berkala

Gedung F - Fakultas Ekonomi Universitas Bandar Lampung

Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi

Kampus A Jalan Z.A. Pagar Alam No. 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung 35142

Telp.: (0721) 701979, Fax.: (0721) 701467, Email:

II. Petunjuk penulisan

Artikel yang dikirim ke **JURNAL** Akuntansi & Keuangan harus mengikuti petunjuk seperti berikut:

1. Naskah merupakan naskah asli yang belum pernah diterbitkan atau sedang dilakukan penilaian pada berkala lain. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia dengan jarak 1 spasi, sepanjang 20-30 halaman kertas A4 dengan tipe huruf Times New Roman.. Naskah dikirim atau diserahkan ke sekretariat **JURNAL** Akuntansi & Keuangan rangkap satu disertai disket berikut dengan biodata penulis dan alamat lengkap (kantor dan rumah) pada lembaran yang terpisah dari halaman pertama artikel.
2. Judul naskah dapat ditulis dengan menggambarkan isi pokok tulisan, dan atau ditulis secara ringkas, jelas, dan menarik.
3. Nama Penulis disertai catatan kaki tentang profesi dan lembaga tempat penulis bekerja dalam naskah yang telah diterima untuk diterbitkan.
4. Abstrak ketik satu spasi, tidak lebih dari 250 kata dalam bahasa Inggris. Abstrak memuat tujuan penelitian, isu, permasalahan, sampel dan metode penelitian, serta hasil dan simpulan (jika memungkinkan).

5. Pendahuluan berisikan uraian tentang latar belakang masalah, ruang lingkup penelitian, dan telaah pustaka yang terkait dengan permasalahan yang dikaji, serta rumusan hipotesis (jika ada). Uraian pendahuluan maksimum 10% total halaman.
6. Untuk penelitian kuantitatif,
 - a. Telaah Literatur dan Pengembangan Hipotesis memuat paling tidak satu buah teori yang menjadi dasar pemikiran penelitian. Hipotesis dikembangkan menggunakan asumsi dasar teori dan hasil penelitian sebelumnya. Telah literatur maksimum 40 % total halaman.
 - b. Metodologi Penelitian meliputi uraian yang rinci tentang bahan yang digunakan, metoda yang dipilih, teknik, dan cakupan penelitian. Uraian bahan dan metoda maksimum 20 % total halaman.
7. Untuk penelitian kualitatif menyesuaikan dengan metodologi kualitatif.
8. Hasil dan Pembahasan merupakan uraian obyektif dari-hasil penelitian dan pembahasan dilakukan untuk memperkaya makna hasil penelitian. Uraian hasil dan pembahasan minimum 25 % total halaman.
9. Simpulan yang merupakan rumusan dari hasil-hasil penelitian. Harus ada sajian dalam satu kalimat inti yang menjadi simpulan utama. Simpulan maksimum 10% dari keseluruhan lembar artikel.
10. Referensi (Daftar Pustaka) ditulis berurutan berdasarkan alphabetical, disusun menggunakan suku kata terakhir dari nama penulisnya, atau institusi jika dikeluarkan oleh organisasi.
 - a. Buku: nama penulis, tahun penerbitan, judul lengkap buku, penyunting (jika ada), nama penerbit, dan kota penerbitan.
 - b. Artikel dalam buku: nama penulis, tahun penerbitan, judul artikel/tulisan, judul buku, nama penyunting, kota penerbitan, nama penerbit, dan halaman.
 - c. Terbitan berkala: nama penulis, tahun penerbitan, judul tulisan, judul terbitan (bila disingkat, sebaiknya menggunakan singkatan yang baku), volume, nomor, dan halaman.
 - d. Artikel dalam internet: nama penulis, judul, dan situsnya.
 - e. Tabel diberi nomor dan judul dilengkapi dengan sumber data yang ditulis dibawah badan tabel, diikuti tempat dan waktu pengambilan data.
 - f. Ilustrasi dapat berupa gambar, grafik, diagram, peta, dan foto diberi nomor dan judul.
11. Setiap referensi yang digunakan di dalam naskah artikel menggunakan petunjuk yang dirujuk pada The Indonesian Journal of Accounting Research, sebagai berikut:
 - A. Kutipan dalam tubuh naskah paper harus disesuaikan dengan contoh berikut:
 - I. Satu sumber kutipan dengan satu penulis (Brownell, 1981).
 - II. Satu sumber kutipan dengan dua penulis (Frucot dan Shearon, 1991).
 - III. Satu sumber kutipan dengan lebih dari satu penulis (Hotstede et al., 1990).
 - IV. Dua sumber kutipan dengan penulis yang berbeda (Dunk, 1990; Mia, 1988).
 - V. Dua sumber kutipan dengan satu penulis (Brownell, 1981, 1983).
 - VI. Dua sumber kutipan dengan satu penulis diterbitkan pada tahun yang sama (Brownell, 1982a, 1982b).
 - VII. Sumber kutipan dari lembaga harus dinyatakan dengan menggunakan akronim institusi (FASB, 1994)
 - B. Setiap artikel harus menulis referensi menggunakan panduan berikut:
 - I. Referensi harus tercantum dalam urutan abjad dari nama belakang penulis atau nama lembaga.

II. Referensi harus dinyatakan dengan urutan sebagai berikut: penulis (s) nama, tahun publikasi, judul kertas atau buku teks, nama jurnal atau penerbit dan nomor halaman. Contoh:

- a) Amerika Akuntansi Association, Komite Konsep dan Standar Laporan Keuangan Eksternal. 1977. Pernyataan tentang Teori Akuntansi dan Teori Penerimaan. Sarasota, FL: AAA.
- b) Demski, J. S., dan D. E. M. Sappington. 1989. Struktur hirarkis dan akuntansi pertanggungjawaban, *Jurnal Akuntansi Penelitian* 27 (Spring): 40-58.
- c) Dye, R. B., dan R. Magee. 1989. Biaya Kontijensi untuk perusahaan audit. Kertas kerja, Northwestern University, Evansto, IL.
- d) Indriantoro, N. 1993. Pengaruh Penganggaran Partisipatif Terhadap Prestasi Kerja dan Kepuasan Kerja dengan Locus of Control dan Dimensi Budaya sebagai Moderating Variabel. Ph.D. Disertasi. University of Kentucky, Lexington.
- e) Naim, A. 1997. Analisis Penggunaan Akuntansi Biaya Produk Dalam Keputusan Harga oligopolistik. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia* 12 (3): 43-50.
- f) Porcano, T. M. 1984a. Keadilan distributif dan Kebijakan Pajak. *Akuntansi Ulasan* 59 (4): 619-636.
- g) ----- . 1984b. Pengaruh Persepsi Kebijakan Pajak Niat Investasi Perusahaan. *The Journal of American Association Perpajakan* 6 (Fall): 7-19.
- h) Pyndyk, R. S. dan D. L. Rubinfeld. 1987. Model ekonometrik & Forecasts Ekonomi, 3rd ed. NY: McGraw-Hill Publishing, Inc.

12. Author(s) harus melampirkan CV, alamat email, alamat korespondensi dan pernyataan yang menyatakan pasal tersebut tidak sedang disampaikan kepada atau diterbitkan oleh jurnal lain dalam email tersebut dan /atau pos.

**PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH (LKPD) TERHADAP TINGKAT KORUPSI PEMERINTAH
DAERAH (STUDI PADA PEMERINTAH KOTA SE-SUMATERA)**

Khairudin

Rina Erlanda

(Universitas Bandar Lampung)

E-Mail: khairudin@ubl.ac.id

Abstract

This study aims to demonstrate empirically the effect of the transparency and accountability of local government financial statements (LKPD) on the level of local government corruption. Tests performed on 15 city government in Sumatera. The data used are secondary data derived from the results of the Corruption Eradication Commission (KPK) on National Integrity Index of local government, the local government website, and the results of the audit The Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK RI) on the financial statements of local government in 2011 to the year 2013. This study using purposive sampling method and using a multiple linear regression analysis. The results showed that the transparency of local government financial statements (LKPD) negatively affect the level of local government corruption and accountability of local government financial statements (LKPD) positive effect on the level of local government corruption.

Keywords: *Transparency, Accountability, Local Government Financial Statements, Corruption, Local Government*

1. Latar Belakang

Perubahan sistem politik, sosial, dan kemasyarakatan serta ekonomi yang dibawa oleh arus reformasi telah menimbulkan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Tantangan pemerintah untuk merealisasikan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*) sangatlah besar, mengingat pelayanan publik yang dilakukan pemerintah telah tercemar dari berbagai bentuk tindakan, kegiatan, dan modus usaha yang tidak sehat yang bermuara pada praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Seperti yang disebutkan oleh Rinaldi, Purnomo, dan Damayanti (2007), sejak berlakunya otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, pada tahun 2001 telah terjadi kecenderungan korupsi yang meningkat.

Setiap akhir tahun, *Transparency International* (TI) mengeluarkan indeks persepsi korupsi peringkat negara yang menunjukkan seberapa besar terjadinya korupsi di sektor publik. Skor yang diberikan memiliki rentang 0-100 atau sangat korup-sangat bersih dari praktek korupsi. Praktek KKN telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara terkorup seperti yang diperlihatkan dari hasil survei yang dilakukan TI dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014.

Tabel 1
Indeks Persepsi Korupsi
Di Beberapa Negara Asia Tenggara

Negara	Indeks Persepsi Korupsi					
	Peringkat	Tahun 2012	Peringkat	Tahun 2013	Peringkat	Tahun 2014
Singapura	5	87	5	86	7	84
Malaysia	54	49	53	50	50	52
Thailand	88	37	102	35	85	38
Filipina	108	34	80	36	85	38
Indonesia	118	32	114	32	107	34

Sumber: *Transparency International* Indonesia (TII), Data Diolah 2015

Output dari tugas pokok dan fungsi instansi/ lembaga pemerintah adalah layanan yang diberikan kepada masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses layanan menjadi keharusan. Fakta layanan publik di Indonesia menunjukkan bahwa sektor ini masih rawan korupsi dalam bentuk penyuapan, pemerasan, gratifikasi ataupun penyalahgunaan wewenang (KPK, 2014:3).

Otonomi daerah yang luas yang telah diberikan kepada daerah dimaksudkan agar pemerintah daerah dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Pemerintah Daerah yang pada akhirnya diharapkan mampu mencapai *good government governance*. Salah satu karakteristik *good governance*, yaitu prinsip akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas diartikan mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010). Sedangkan, transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi (Tahir, 2012).

Menurut Mardiasmo (2002), laporan keuangan yang dihasilkan oleh organisasi sektor publik pemerintah merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010. Laporan keuangan akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melihat apakah laporan keuangan telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Opini laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2014 atas 504 Pemerintah Daerah dan perkembangan opini laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 disajikan dalam tabel 2. Tabel 2 menunjukkan bahwa BPK RI telah memberikan opini atas 523 LKPD tahun 2012, 524 LKPD tahun 2013, dan 501 LKPD tahun 2014. Belum seluruh Pemerintah Daerah dapat diberikan opini atas LKPD untuk tahun anggaran 2014 yang seharusnya opini diberikan kepada 539 Pemerintah Daerah yang wajib menyerahkan LKPD Tahun 2014.

Tabel 2
Perkembangan Opini LKPD di Indonesia
Tahun 2012 – Tahun 2014

LKPD	Opini								Jumlah
	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%	
Tahun 2012	120	2,95	319	60,99	6	1,15	78	14,91	523
Tahun 2013	156	29,77	311	59,35	11	2,1	46	8,78	524
Tahun 2014	251	49,80	230	45,64	4	0,79	19	3,77	504

Sumber: IHPS BPK RI, Data Diolah 2015

Berdasarkan data *Indonesia Corruption Watch (ICW)* sepanjang tahun 2014 terjadi 629 kasus korupsi dan sebanyak 1.328 tersangka yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 5,29 triliun. Kasus korupsi mengalami peningkatan sebesar 69 kasus dibandingkan selama tahun 2013, yaitu 560 kasus korupsi yang menyebabkan kerugian Rp 7,3 triliun uang negara.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris pengaruh transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah. Penelitian ini penting untuk dilakukan melihat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengalami peningkatan yang menunjukkan semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) akan tetapi kasus korupsi yang terjadi di instansi pemerintah terus meningkat setiap tahunnya.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Landasan Teori

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan membahas tentang hubungan keagenan dimana suatu pihak tertentu (*principal*) mendelegasikan pekerjaan kepada pihak lain (*agent*) yang melakukan pekerjaan. Dalam teori agensi yang diperkenalkan oleh Jensen dan Meckling (1976) menyatakan diantara pihak-pihak yang berkepentingan, pemilik dan pengelola, sejak perusahaan publik melakukan pemisahan antara keduanya, terdapat asimetri informasi antara kedua pihak tersebut. Adanya asimetri informasi inilah yang memungkinkan terjadinya penyelewengan atau korupsi oleh agen.

Mardiasmo (2002) menyatakan kewajiban pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Pendapat Mardiasmo (2002) tentang akuntabilitas dalam konteks sektor publik mengandung arti bahwa dalam pengelolaan pemerintah daerah terdapat hubungan keagenan (teori keagenan) antara masyarakat sebagai *principal* dan pemerintah daerah sebagai *agent*.

Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Transparansi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, transparansi berarti memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme harus memenuhi salah satunya asas keterbukaan. Asas keterbukaan yang dimaksud, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999).

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010). Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam (Mardiasmo, 2002: 21), yaitu: akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) dan akuntabilitas horisontal (*horizontal accountability*). Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada majelis permusyawaratan rakyat (MPR). Pertanggungjawaban horisontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan rakyat.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Mardiasmo (2002: 159) menjelaskan bahwa laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran (LRA), neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah yang disusun sesuai standar akuntansi pemerintah.

Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) disusun berdasarkan laporan keuangan yang dibuat oleh seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD). SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang. Mengacu pada Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, laporan keuangan SKPD disampaikan kepada Kepala Daerah paling lambat dua bulan setelah akhir tahun anggaran/ periode akuntansi berakhir.

Penyusunan dan penyajian LKPD dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Penyajian LKPD dilampiri dengan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan perusahaan daerah. Laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan.

Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Adanya keterbukaan dalam penyelenggaraan urusan publik akan memudahkan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Pengawasan dari masyarakat dapat mencegah terjadinya penyimpangan alokasi sumber daya maupun berbagai pelanggaran dalam kegiatan pemerintahan seperti korupsi (ITB, 2004).

Menurut Munir (2003) anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial (uang). Anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam pengelolaannya harus memperhatikan prinsip transparansi. Akses masyarakat terhadap dokumen anggaran penting baik untuk akuntabilitas finansial pemerintah dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh para elit politik di daerah (Gedeona, 2005).

Menurut Sopanah dan Mardiasmo (2003) anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparansi jika memenuhi beberapa kriteria berikut: (1) terdapat pengumuman kebijakan anggaran, (2) tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses, (3) tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, (4) terakomodasinya suara/ usulan rakyat, dan (5) terdapat sistem pemberian informasi kepada publik. Selain itu, Aminah dan Tarmizi (2013) mengatakan informasi lainnya yang dipublikasikan Pemerintah Daerah terkait dengan aktivitas penting lainnya yang tidak dibatasi kriterianya, seperti informasi pengadaan barang terbuka/ tender, informasi kesempatan investasi di daerah, informasi kekayaan alam, informasi *green government*, dan lain sebagainya sebagai kriteria transparansi.

Akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) menjadi hal penting karena merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Untuk mengetahui akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah perlu dilakukan pemeriksaan (diaudit) yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, sebagai pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006.

Pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bertujuan untuk memberikan pendapat/ opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan pada kriteria: (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan atau prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, (b) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (d) efektivitas sistem pengendalian intern menurut Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (RI) Nomor 01 Tahun 2007. Merujuk pada standar pemeriksaan keuangan negara (SPKN) Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Nomor 1 Tahun 2007 terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, sebagai berikut: 1. *Wajar tanpa pengecualian (WTP)*, 2. *Wajar dengan pengecualian (WDP)*, 3. *Tidak wajar (TW)*, 4. *Tidak memberikan pendapat (TMP)*.

Korupsi

Pengertian Korupsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tindak pidana korupsi yaitu setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, ada 30 jenis tindakan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi itu dapat dikelompokkan menjadi 7 kategori, yaitu: (1) kerugian keuangan negara, (2) suap-menyuap, (3) penggelapan dalam jabatan, (4) pemerasan, (5) perbuatan curang, (6) benturan kepentingan dalam pengadaan, dan (7) gratifikasi.

Penyebab Korupsi

Klitgaard (1998) menyebutkan bahwa korupsi dikarenakan adanya monopoli kekuasaan terhadap barang dan jasa ditambah dengan adanya kekuasaan untuk melakukan diskresi mengenai siapa yang akan atau berhak menerima barang atau jasa tersebut tetapi tanpa diimbangi adanya akuntabilitas. Menurut Shah (2007) terjadinya korupsi di sektor publik akan sangat tergantung pada sejumlah faktor yaitu: (1) kualitas manajemen sektor publik, (2) keadaan hubungan akuntabilitas antara pemerintah dan masyarakat, (3) kerangka hukum, dan (4) tingkatan dimana proses sektor publik dilengkapi dengan transparansi.

Dampak Korupsi

Menurut Pope (2008) korupsi adalah perilaku yang merusak sistem sosial. Kebijakan politik dan sistem hukum disusun untuk melindungi elit politik yang korup, sekaligus menjadi alat untuk menghancurkan kekuatan sosial masyarakat yang ingin melawan. Berbagai keputusan penting demi

kepentingan orang banyak diambil berdasarkan pertimbangan kepentingan pribadi, tanpa mempedulikan akibat sosialnya bagi kehidupan masyarakat banyak. Korupsi selalu mengakibatkan situasi sosial-ekonomi tidak pasti. Korupsi sering menjadi beban pajak tambahan atas sektor swasta. Investor asing sering memberi reaksi negatif atas hal ini. Sebuah negara dapat mencapai tingkat investasi asing yang optimal, jika negara bersangkutan terlebih dulu memberantas korupsi dan pajak tidak resmi atas para investor (Pope, 2008).

Penanggulangan Korupsi

Menyangkut korupsi di pemerintahan daerah, menurut de Asis (2006) terdapat lima strategi yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi, yakni meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, penilaian keinginan politik dan titik masuk untuk memulai, mendorong partisipasi masyarakat, mendiagnosa masalah yang ada, serta melakukan reformasi dengan menggunakan pendekatan yang holistik. Menurut Shah (2007) pemberantasan korupsi membutuhkan pemahaman terhadap penyebab dari munculnya masalah korupsi tersebut pada sebuah negara/ daerah sehingga perlu dipertimbangkan kondisi pengaruh dari korupsi atau kualitas dari tata kelola pemerintahan yang ada di negara/daerah tersebut.

Mengukur Tingkat Korupsi

Tingkat korupsi yang terjadi di suatu daerah secara tepat sulit diketahui. Sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi Presiden Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) jangka panjang 2012-2025 dan Stranas PPK jangka menengah tahun 2012-2014. Indikator utama keberhasilan Stranas PPK di tingkat nasional diukur menggunakan *Corruption Perception Index* (CPI) dan *National Integrity System* (NIS). Sasaran utama Stranas PPK adalah menurunkan tingkat korupsi dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera dan bebas korupsi.

Survei integritas sektor publik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilakukan dalam rangka menilai tingkat integritas layanan publik dan merupakan salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk memastikan faktor penyebab terjadinya korupsi di layanan publik. Responden yang dipilih adalah yang mengurus langsung layanan dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Nilai integritas dalam survei ini berkisar antara 0–10, yang menunjukkan bahwa semakin mendekati 10, integritas untuk layanan semakin baik dan sebaliknya jika mendekati 0, integritas layanan semakin buruk (www.kpk.go.id).

2.2 Penelitian Terdahulu

Setiawan (2012) meneliti tentang pengaruh akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia. Hasil penelitiannya, Setiawan menemukan bahwa akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia.

Kurniawan (2009) meneliti peranan akuntabilitas publik dan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi di pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan untuk memberantas korupsi di Indonesia masih parsial dan cenderung tidak memiliki strategi desain yang jelas sehingga dalam banyak kasus tidak mampu mengurangi tingkat korupsi yang terjadi.

Gedeona (2005) melakukan penelitian mengenai transparansi pengelolaan anggaran daerah sebagai sebuah alternatif pemberantasan korupsi di tingkat daerah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ketertutupan sistem pengelolaan anggaran hendaknya diubah dengan penekanan pada prinsip transparansi karena terlalu berbahaya untuk dibiarkan berlangsungnya tanpa transparansi.

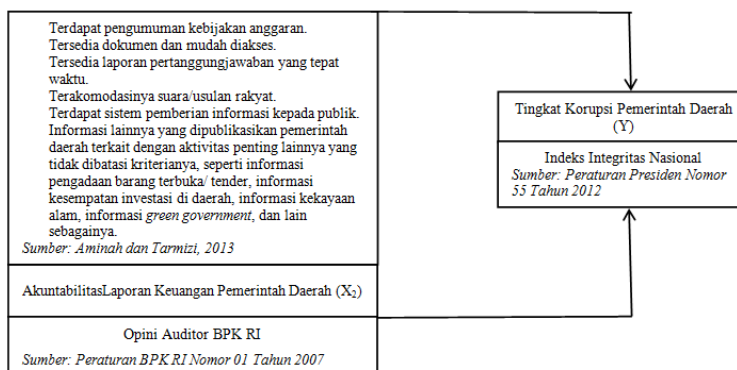
Aminah dan Tarmizi (2013) meneliti mengenai hubungan antara transparansi dan akuntabilitas pada kinerja laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Hasil penelitian menemukan bahwa transparansi dan akuntabilitas memiliki hubungan positif terhadap kinerja LKPD.

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis

Untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme harus memenuhi salah satunya asas keterbukaan. Penerapan asas keterbukaan (transparan) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui berbagai informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif.

Pemerintah Daerah sebagai pihak yang diberi amanat oleh rakyat untuk menjalankan pemerintahan di daerah harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik. Akuntabilitas diyakini memberikan kontribusi dalam usaha mereduksi praktek korupsi yang banyak terjadi di Pemerintah Daerah. Klitgaard (1998) berpendapat bahwa salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi adalah dengan memperbaiki sistem yang korup yakni dengan akuntabilitas. Untuk mengetahui tingkat akuntabilitas Pemerintah Daerah perlu dilakukan pemeriksaan (diaudit). Akuntabilitas Pemerintah Daerah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu, maka kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1
Kerangka Pemikiran Teoritis



2.4 Hipotesis Penelitian

Pengaruh Transparansi terhadap Tingkat Korupsi

Gedeona (2005) menyatakan bahwa ketertutupan sistem pengelolaan anggaran hendaknya diubah dengan penekanan pada prinsip transparansi karena terlalu berbahaya untuk dibiarkan berlangsungnya tanpa transparansi. Adanya keterbukaan dalam penyelenggaraan urusan publik akan memudahkan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Pengawasan dari masyarakat dapat mencegah terjadinya penyimpangan alokasi sumber daya maupun berbagai pelanggaran dalam kegiatan pemerintahan seperti korupsi (ITB, 2004). Keterbukaan (*openness*) Pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi diperlukan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Transparansi diyakini mampu mereduksi tingkat korupsi, dan sebaliknya.

H1 = Transparansi laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi Pemerintah Daerah.

Pengaruh Akuntabilitas terhadap Tingkat Korupsi

Menurut de Asis (2006) strategi yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi di pemerintahan daerah salah satunya, yaitu dengan meningkatkan akuntabilitas. Akuntabilitas diyakini memberikan kontribusi dalam usaha mereduksi praktek korupsi yang banyak terjadi di Pemerintah Daerah. Opini audit laporan keuangan menunjukkan tingkat kewajaran yang mencerminkan tingkat akuntabilitas laporan keuangan yang diyakini memberikan kontribusi dalam usaha mereduksi praktek korupsi. Opini audit yang wajar menunjukkan akuntabilitasnya baik diyakini mampu mereduksi tingkat korupsi, demikian juga sebaliknya.

H2 = Akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi Pemerintah Daerah

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kausalitas. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kota se-Sumatera. Pemerintah Kota (Pemkot) yang menjadi sampel dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria tertentu (*purposive sampling*) dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Terdapat 15 Pemerintah Kota yang dapat dijadikan sebagai sampel dalam penelitian, yaitu Pemkot Banda Aceh, Pemkot Medan, Pemkot Binjai, Pemkot Pematang Siantar, Pemkot Dumai, Pemkot Pekanbaru, Pemkot Bukittinggi, Pemkot Padang, Pemkot Tanjung Pinang, Pemkot Batam, Pemkot Bengkulu, Pemkot Palembang, Pemkot Jambi, Pemkot Metro, dan Pemkot Bandar Lampung.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data transparansi diperoleh dari *website* masing-masing Pemerintah Kota se-Sumatera. Data akuntabilitas diperoleh dari opini yang diterbitkan BPK RI Perwakilan masing-masing daerah melalui laporan hasil pemeriksaan (LHP). Data tingkat korupsi diperoleh dari indeks integritas nasional yang dipublikasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara dokumentasi dan studi pustaka.

3.1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah tingkat korupsi Pemerintah Daerah. Indeks integritas nasional merupakan indeks yang berupa skala numerik yang mengukur tingkat korupsi dalam Pemerintah Daerah, rentang indeksnya adalah dari 0 sampai dengan 10. Indeks tersebut menunjukkan semakin mendekati 10, integritas untuk layanan semakin baik dan sebaliknya jika mendekati 0, integritas layanan semakin buruk.

Variabel tingkat korupsi pemerintah daerah diukur menggunakan indeks integritas nasional yang dimodifikasi (Setiawan, 2012). Proses modifikasinya menggunakan dasar logika apabila nilai indeks integritas nasional adalah 0 maka tingkat korupsinya adalah 10 (terjadi korupsi yang sangat tinggi) dan apabila nilai indeks integritas nasional adalah 10 maka tingkat korupsinya adalah 0 (tidak terjadi praktek korupsi). Rumus operasional matematikanya, yaitu:

$$\text{Tingkat Korupsi} = 10 - \text{Indeks Integritas Nasional}$$

Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah. Ukuran transparansi yang digunakan dalam penelitian ini melihat seberapa banyak informasi Pemerintah Daerah yang terdapat dalam *website* Pemerintah Daerah. Indikator

yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada penelitian Aminah dan Tarmizi (2013) yang menggunakan enam kriteria dalam mengukur transparansi sebagai berikut:

1. Terdapat pengumuman kebijakan anggaran.
2. Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses.
3. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.
4. Terakomodasinya suara/usulan rakyat.
5. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.
6. Informasi lainnya yang dipublikasikan Pemerintah Daerah terkait dengan aktivitas penting lainnya yang tidak dibatasi kriterianya, seperti informasi pengadaan barang terbuka/ tender, informasi kesempatan investasi di daerah, informasi kekayaan alam, informasi *green government*, dan lain sebagainya yang memiliki kandungan informasi penting.

Penelitian ini menggunakan pengukuran transparansi dengan skala 1 sampai 4. Apabila memenuhi enam kriteria tersebut dan selisih satu kriteria maka Pemerintah Daerah tersebut akan diberi skor 4, dan seterusnya. Semakin banyak informasi yang dirilis Pemerintah Daerah ke dalam *website*, maka diasumsikan semakin tinggi pula tingkat transparansi Pemerintah Daerah tersebut.

Opini audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terdiri dari empat opini, yaitu wajar tanpa pengecualian (WTP/ *unqualified opinion*), wajar dengan pengecualian (WDP/ *qualified opinion*), tidak wajar (TW/ *adverse opinion*), dan tidak memberikan pendapat (TMP/ *disclaimer opinion*). Pengukuran opini menggunakan skala 1 sampai 4 dengan WTP diberi nilai 4, WDP diberi nilai 3, TW diberi nilai 2, dan TMP diberi nilai 1.

3.2. Analisis Data

Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif merupakan suatu analisis data yang tidak memerlukan pengujian secara matematis dan sistematis. Namun, hanya bersifat penjelasan berdasarkan data yang ada melalui statistik deskriptif berupa nilai rata-rata (mean), standar deviasi, dan kisaran skor maksimum dan minimum (Singarimbun dan Efendi, 2000).

Analisis Kuantitatif

Adapun alat analisis kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda, uji hipotesis, dan koefisien determinasi.

Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel transparansi dan akuntabilitas terhadap tingkat korupsi. Adapun persamaan rumus sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Korupsi} = a_0 + b_1(TS) + b_2(AK) + \text{error}$$

dimana:

a	= konstanta	TS	= transparansi
b ₁ dan b ₂	= koefisien regresi	AK	= akuntabilitas

Uji Hipotesis

Untuk melakukan pengujian pada penelitian menggunakan uji signifikan parameter individual (uji t). Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 ($\alpha=5\%$).

Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011:97). Nilai R^2 berkisar antara 0 sampai 1, semakin tinggi nilai R^2 maka semakin baik pula kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai R^2 yang kecil menunjukkan kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas dan berlaku sebaliknya.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1. Hasil Penelitian

Analisis Kualitatif

Uji statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi dari suatu data yang dilihat dari jumlah sampel, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean), dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Tabel 4.2. menunjukkan statistik deskriptif dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 3
Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TRANSPARANSI	45	1	4	2,36	1,264
AKUNTABILITAS	45	3	4	3,44	,503
TINGKAT KORUPSI	45	2,23	6,85	3,6804	,94626
Valid N (listwise)	45				

Sumber: Data Diolah dengan SPSS, 2016

Berdasarkan tabel 3 di atas, hasil statistik deskriptif nilai minimum variabel independen transparansi adalah 1 dan nilai maksimum 4 dengan nilai rata-rata sebesar 2,36, serta standar deviasinya adalah 1,264. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata (*mean*) mengandung arti bahwa penerapan transparansi pada masing-masing Pemkot tidak jauh berbeda dan penyimpangan masing-masing data transparansi relatif kecil. Nilai minimum variabel akuntabilitas sebesar 3, nilai maksimum 4, dan nilai rata-rata 3,44, serta standar sebesar 0,503. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata (*mean*) mengandung arti bahwa

penerapan akuntabilitas pada masing-masing Pemkot tidak jauh berbeda dan penyimpangan masing-masing data akuntabilitas relatif kecil.

Variabel tingkat korupsi dengan nilai minimum sebesar 2,23, nilai maksimum 6,85, nilai rata-rata sebesar 3,6804, dan standar deviasi sebesar 0,94626. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata (*mean*) mengandung arti bahwa tingkat korupsi pada masing-masing Pemkot tidak jauh berbeda dan penyimpangan masing-masing data tingkat korupsi relatif kecil.

Analisis Kuantitatif

Analisis Regresi Berganda

Hipotesis dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh variabel transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah dengan menggunakan regresi linear berganda. Berdasarkan hasil penelitian, analisis linier berganda dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini:

Tabel 4
Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients ^a		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,170	,915		1,278	,208
TRANSPARANSI	-,130	,108	-,174	-1,206	,235
AKUNTABILITAS	,818	,271	,434	3,015	,004

a. Dependent Variable: TINGKAT KORUPSI

Sumber: Data Diolah dengan SPSS, 2016

Tingkat Korupsi = 1,170 – 0,130TS + 0,818AK + error

Dari persamaan regresi yang ada, maka persamaan regresi tersebut dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Besarnya konstanta adalah 1,170. Hal ini menunjukkan bahwa nilai tingkat korupsi akan tetap sebesar 1,17 tanpa adanya pengaruh dari variabel-variabel bebas.
- b. Variabel transparansi (TS) dengan nilai 0,130 bertanda negatif yang artinya transparansi memiliki pengaruh ke arah negatif terhadap tingkat korupsi atau mengindikasikan bahwa setiap peningkatan transparansi pemerintah daerah sebesar 1 poin maka akan menyebabkan penurunan tingkat korupsi sebesar 13% apabila faktor-faktor lainnya konstan.
- c. Variabel akuntabilitas dengan nilai 0,818 bertanda positif yang artinya akuntabilitas memiliki pengaruh ke arah positif terhadap tingkat korupsi atau setiap peningkatan tingkat akuntabilitas maka akan menyebabkan peningkatan tingkat korupsi sebesar 81,8% apabila faktor-faktor lainnya konstan.

Uji Hipotesis

Untuk melakukan pengujian pada penelitian menggunakan uji signifikan parameter individual (uji t). Berdasarkan hasil penelitian, uji t dapat di lihat pada tabel 5 dan tabel 6 dapat disimpulkan sebagai berikut:

Tabel 5
Hasil Pengujian Hipotesis X₁ terhadap Y
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3,798	,304		12,504	,000
TRANSPARANSI	-,050	,114	-,067	-,438	,664

a. Dependent Variable: TINGKAT KORUPSI

Sumber: Data Diolah dengan SPSS, 2016

Tabel 6
Hasil Pengujian Hipotesis X₂ terhadap Y
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,141	,920		1,241	,221
AKUNTABILITAS	,737	,264	,391	2,790	,008

a. Dependent Variable: TINGKAT KORUPSI

Sumber: Data Diolah dengan SPSS, 2016

1. Pengaruh Variabel Transparansi terhadap Tingkat Korupsi

Hipotesis pertama yang diajukan menyatakan bahwa transparansi berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi. Berdasarkan tabel 5 diperoleh tingkat signifikansi untuk variabel transparansi sebesar 0,664 yang menunjukkan berada di atas 0,05. Hal ini berarti variabel transparansi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat korupsi pada pemerintah kota. Dengan itu, hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini diterima.

2. Pengaruh Variabel Akuntabilitas terhadap Tingkat Korupsi

Hipotesis kedua yang diajukan menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi. Berdasarkan tabel 6 diperoleh tingkat signifikansi untuk variabel akuntabilitas sebesar 0,008 yang menunjukkan berada di bawah 0,05. Hal ini berarti variabel transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat korupsi pada pemerintah kota. Dengan itu, hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini ditolak.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Nilai koefisien determinasi dilihat pada *R Square*, hasil penelitian dapat dilihat pada tabel 8 dan tabel 9 di bawah ini:

Tabel 7
Hasil R Square Pengaruh Transparansi terhadap Tingkat Korupsi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
dimension0 1	,067 ^a	,004	-,019	,95507

a. Predictors: (Constant), TRANSPARANSI

Sumber: Data Diolah dengan SPSS, 2016

Berdasarkan output SPSS pada tabel 7 di atas dapat dilihat bahwa dari hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi *R Square* sebesar 0,004. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan menjelaskan variabel transparansi terhadap variabel dependen, yaitu tingkat korupsi yang dapat diterangkan oleh model persamaan ini sebesar 0,4% sedangkan sisanya sebesar 99,6% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel penelitian.

Tabel 8
Hasil *R Square* Pengaruh Akuntabilitas terhadap Tingkat Korupsi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
dimension0 1	,391 ^a	,153	,134	,88079

a. Predictors: (Constant), AKUNTABILITAS

Sumber: Data Diolah dengan SPSS, 2016

Berdasarkan output SPSS pada tabel 8 di atas dapat dilihat bahwa dari hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi *R Square* sebesar 0,153. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan menjelaskan variabel akuntabilitas terhadap variabel dependen, yaitu tingkat korupsi yang dapat diterangkan oleh model persamaan ini sebesar 15,3% sedangkan sisanya sebesar 84,7% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel penelitian.

4.2. Pembahasan

Pengaruh Transparansi terhadap Tingkat Korupsi

Berdasarkan pengujian yang dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat korupsi pada pemerintah daerah. Hasil penelitian sejalan dengan pendapat ITB (2004) bahwa pengawasan dari masyarakat dapat mencegah terjadinya penyimpangan alokasi sumber daya maupun berbagai pelanggaran dalam kegiatan pemerintahan seperti korupsi. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan Gedeona (2005) yang melakukan penelitian mengenai transparansi pengelolaan anggaran daerah sebagai sebuah alternatif pemberantasan korupsi di tingkat daerah. Ketertutupan sistem pengelolaan anggaran terlalu berbahaya untuk dibiarkan terus berlangsung tanpa transparansi. Semakin meningkatnya transparansi pemerintah daerah akan mengurangi tingkat korupsi dan sebaliknya.

Pengaruh Akuntabilitas terhadap Tingkat Korupsi

Berdasarkan pengujian yang dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat korupsi pada pemerintah daerah. Hasil ini tidak mendukung penelitian Setiawan (2012) yang menyatakan bahwa akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia. Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Kurniawan (2009) bahwa akuntabilitas publik dalam banyak kasus tidak mampu mengurangi tingkat korupsi yang terjadi. Opini audit yang wajar

menunjukkan akuntabilitasnya baik diyakini mampu mengurangi tingkat korupsi. Namun, walaupun tingkat akuntabilitas Pemerintah Daerah dengan perolehan opini audit yang diberikan oleh BPK RI, baik dengan mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dan wajar dengan pengecualian (WDP) tidak menjamin bahwa tingkat korupsi di Pemerintah Daerah rendah.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa transparansi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat korupsi. Ini mengindikasikan bahwa peningkatan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah dapat mengurangi tingkat korupsi pemerintah dan kurangnya transparansi dapat menyebabkan tingginya tingkat korupsi pemerintah daerah. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, hipotesis pertama penelitian ini diterima.

Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat korupsi. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah tidak dapat mengurangi tingkat korupsi pemerintah daerah. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, hipotesis kedua penelitian ini ditolak.

5.2. Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan untuk Pemerintah Daerah, yaitu:

1. Pemerintah Daerah sebaiknya lebih meningkatkan transparansi dengan menginformasikan setiap perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan, serta pertanggungjawaban pemerintah kepada publik sehingga masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap jalannya penyelenggaraan urusan publik dan mencegah terjadinya korupsi.
2. Pemerintah Daerah sebaiknya melakukan upaya pemberantasan korupsi yang diarahkan pada penguatan peran masyarakat dalam mengawasi pemerintah dan penguatan akuntabilitas publik secara lebih efektif dan efisien di masa mendatang.

Daftar Pustaka

Aminah, dan Rosmiati Tarmizi. 2013. *Penerapan Good Governance pada Pemerintah Daerah Se-Indonesia*.

Butar, Sansaloni Butar. 2014. Implikasi Regulasi Pasar Modal terhadap Motif Manajemen Laba: Pengujian Berbasis Teori Pensinyalan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia Volume 11 Nomor 1: 99-119*.

De Asis, Maria Gonzales. 2006. *Reducing Corruption at the Local Level*. Washington DC: World Bank Institute.

Elwood, Sheila. 1993. *Parish and Town Councils: Financial Accountability and Management. Local Government Studies, Volume 19*: 368-386.

Engers, M. 1987. *Signaling with Many Signals. Econometrica*, 55, 663-674.

Gedeona, Hendrikus Triwibawanto. 2005. *Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah: Sebuah Alternatif Pemberantasan Korupsi di Tingkat Daerah. Jurnal Ilmu Administrasi, Volume 2, Nomor 3*: 245-256.

Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hartono, Jogyanto. 2000. *Hubungan Kandungan Informasi Arus Kas, Komponen Arus Kas, dan Laba Akuntansi dengan Harga atau Return Saham. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia, Volume 3*.

ITB, CUI. 2004. *Keterkaitan Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pencapaian Good Governance. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Volume 15, Nomor 1*: 34-37.

Jensen, M. C., and W. Meckling. 1976. *Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost, and Ownership Structure. Journal Of Financial Economics 3*: 305-360.

Klitgaard, Robert. 1998. *International Cooperation Against Corruption. Finance & Development, Volume 35, Number 1*.

Komisi Pemberantasan Korupsi. 2014. *Integritas Sektor Publik Tahun 2013: Fakta Korupsi dalam Layanan Publik*. Jakarta: KPK.

Kurniawan, Teguh. 2009. *Peranan Akuntabilitas Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi di Pemerintahan. Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi Volume 16, Nomor 2*: 116-121.

Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.

Mardiasmo. 2002. *Otonomi Daerah sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah. Seminar Pendalaman Ekonomi Rakyat*.

Marston, Claire. 2003. *Financial reporting on the Internet by leading Japanese companies. Corporate Communications: An International Journal, Volume 8 (1)*:23- 34.

Morris, R. D. 1987. *Signalling, Agency Theory and Accounting Policy Choice. The Accounting and Business Research*, 18, 47-56.

Munir, Badrul. 2003. *Perencanaan Anggaran Kinerja: Memangkas Inefisiensi Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Samawa Center.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pope, Jeremy. 2008. *Strategi Memberantas Korupsi (Edisi Ringkas)*. Jakarta: Transparency International Indonesia.

Prabowo, Ronny, dan Kurniawan Sekar Angkoso. 2006. *Factors Influencing The Extent of Web-Based Disclosure: An Empirical Analysis of Indonesian Manufacturing Firms*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Volume 8, Nomor 2: 92-98.

Republik Indonesia, Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Rinaldi, Taufik, Marini Purnomo, dan Dewi Damayanti. 2007. *Fighting Corruption in Decentralized Indonesia Case Studies on Handling Local Government Corruption*.

Setiawan, Wahyu. 2012. Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia. *Skripsi Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro*.

Shah, Anwar (Edited). 2007. *Performance Accountability and Combating Corruption*. Washington DC: The World Bank.

Singarimbun, Masri, dan Sopian Effendi. 2000. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Pustaka LP3ES.

Sopannah, dan Mardiasmo. 2003. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan Pengetahuan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi (SNA) VI di Surabaya*.

Spence, M. 1973. *Job Market Signaling*. *The Quarterly Journal of Economics*, 87 (3), 355-374.

Tahir, Arifin. 2012. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Gorontalo. *Jurnal Akuntansi*, Volume XVI, No. 03: 413-426.

www.bpk.go.id

www.kpk.go.id

www.ti.or.id